



STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA SEMARANG

Silvy Aprilia Haryanti¹, Rico Paulus Sibuea²

¹ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

² Kementerian Dalam Negeri

Corresponding author: Silvyapry342@gmail.com

Received: 19-01-2023, Accepted: 16-08-2023; Published Online: 16-08-2023

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia dengan intensitas penularan yang tinggi pada masa pandemi COVID-19. Hal tersebut menyebabkan ditetapkan Kota Semarang menjadi zona merah. Oleh sebab itu masyarakat perlu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Lahirnya Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Semarang tidak juga dapat membuat masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memperoleh data dan informasi mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di Kota Semarang dan untuk mendeskripsikan, memperoleh data dan informasi mengenai strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Semarang mengenai protokol kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman, faktor lingkungan, dan taraf hidup masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai protokol kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan beberapa agenda dengan tujuan agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa strategi satuan polisi pamong praja kota semarang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sudah tepat dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena dengan strategi tersebut terbukti menurunkan angka positif covid-19 di Kota Semarang.

Kata Kunci: Strategi; Kesadaran Masyarakat; Covid-19.



ABSTRACT

Semarang City is one of the cities in Indonesia with a high transmission rate during the COVID-19 pandemic. This has led to the designation of Semarang City as a red zone. Therefore, it is essential for the community to strictly adhere to health protocols. The issuance of Semarang Mayor Regulation Number 28 of 2020 concerning guidelines for implementing activity restrictions to accelerate the handling of COVID-19 in Semarang City did not, however, guarantee full compliance from the public in following the health protocols. The purpose of this research is to describe and obtain data and information on the factors causing the low awareness of the community in complying with health protocols in Semarang City, as well as to describe and gather data and information on the strategies employed by the Satuan Polisi Pamong Praja (Municipal Police) to enhance public awareness and compliance with health protocols as a preventive measure against COVID-19 in Semarang City. This research is conducted as a qualitative study using a descriptive approach. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation. The low level of public awareness in Semarang City regarding health protocols is influenced by several factors, including a lack of understanding, environmental factors, and the community's standard of living. To improve public awareness of health protocols, the Satuan Polisi Pamong Praja carries out various activities with the aim of encouraging the public to better adhere to health protocols. Based on the conducted research, the researcher concludes that the strategies employed by the Satuan Polisi Pamong Praja in Semarang City to enhance public awareness and compliance with health protocols are appropriate and have been effective in reducing the number of positive COVID-19 cases in the city.

Keywords: Strategy; Public Awareness; COVID-19.

PENDAHULUAN

Kota Semarang merupakan suatu daerah yang menjadi pusat pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini termasuk dalam lima kota terbesar di Indonesia, selain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Sebagai salah satu kota besar, Kota Semarang menjadi kota dengan perkembangan terpesat di Provinsi Jawa Tengah maupun di Indonesia. Kota ini terletak di antara Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Semarang, dimana ketiga kota tersebut merupakan Kota Penghubung Jalur Pantura (Pantai Utara Jawa) yang berarti Kota Semarang akan dilewati oleh banyak orang maupun

kendaraan dari Barat ke Timur Indonesia maupun sebaliknya. Dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS (2020) yaitu kurang lebih 1,65 juta jiwa penduduk tetap dan memiliki luas wilayah 373,78 km² dengan kepadatan penduduk di angka 4.423,79 km². Jumlah tersebut menjadikan Kota ini rentan dengan resiko penularan Covid-19. Adapun data informasi kasus Covid-19 di Kota Semarang tahun 2020 s.d. 2022 disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Informasi Corona Virus (Covid-19) Kota Semarang (Tahun 2020 s.d. 2022)

No	Keterangan	Jumlah Orang per Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kasus Sembuh	18.011	64.688	100.710
2	Kasus Meninggal	1.652	4.848	8.152
3	Total Kasus	19.663	69.536	108.862

Sumber: <https://siagacorona.semarangkota.go.id/halaman/covid19pertahun/2022,2022>

Berdasarkan data pada tabel informasi Covid-19 di atas dapat dipahami bahwa total kasus orang yang terinfeksi Covid-19 mengalami peningkatan dari tahun 2020 s.d. 2022. Hal tersebut menyebabkan Kota Semarang menjadi salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dikategorikan sebagai daerah zona merah. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang berupaya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, penerapan *social dan physical distancing*, pemakaian masker wajah untuk menghindari penyebaran penyakit Covid 19 melalui *droplets* (air liur) dan melengkapi diri dengan alat sanitasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Walikota Semarang mengambil langkah cepat dan tepat dengan membentuk dan mengundang Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan

kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Semarang.

Sebagai upaya dalam mencegah penyebaran kluster Covid-19 secara masif di wilayah Kota Semarang, Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang berperan dalam mengawasi jalannya penegakkan Peraturan Daerah di Kota Semarang dan harus mengambil beberapa langkah guna mengawasi jalannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Satpol PP memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penegakkan protokol kesehatan di Kota Semarang sehingga dapat terwujudnya ketertiban umum dan mencegah Kota Semarang menjadi episentrum baru dan meluasnya *cluster* penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah maupun Indonesia. Dalam hal ini makan perlu menyusun rencana strategis meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan di Kota Semarang.

Meskipun sudah ada payung hukum yang mengatur mengenai pembatasan kegiatan masyarakat, kewajiban untuk membawa hand sanitizer, memakai masker, melaksanakan *social* serta *physical distancing* pada kenyataannya di lapangan masih banyak sekali warga Kota Semarang yang tidak

mengindahkan peraturan tersebut dan terus melanggar. Dilansir dari <https://www.ayosemarang.com/semarang-ray/pr-77796780/Piye-Jal-Kota-Semarang-Jadi-Pelanggar-Protokol-Kesehatan-Tertinggi-di-Jateng> pada 18 Agustus 2021, menurut Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna, Kota Semarang menjadi daerah dengan pelanggar protokol kesehatan tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Semarang masih rendah.

Dengan demikian, berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui strategi dari Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Semarang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi perihal protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Semarang.

KAJIAN TEORI

A. Strategi

Berdasarkan pendapat Rangkuti (2006), pada intinya strategi merupakan sebuah respon yang dapat dijadikan acuan dengan stimulus secara terus menerus terhadap kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal yang dapat berdampak pada suatu organisasi. Respon yang dimaksud oleh Rangkuti adalah dengan melakukan

tindakan untuk memperbanyak kekuatan dan menutupi atau mengurangi kelemahan yang ada pada organisasi tersebut, karena jika salah mengambil langkah atau tindakan justru akan memperbanyak kelemahan dan mengurangi kelebihan yang akhirnya tujuan dari organisasi tidak bisa terwujud. Dalam menyusun strategi yang diperlukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengenai berbagai cara dalam menyelesaikan permasalahan penegakan protokol di Kota Semarang terkait dengan teori Rangkuti dimana dalam suatu strategi, Satuan Polisi Pamong Praja harus mengumpulkan informasi mengenai apa yang menjadi kendala penegakan protokol kesehatan di Kota Semarang, menganalisis apa saja peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dari penegakan protokol kesehatan di Kota Semarang, serta membuat suatu keputusan yang tepat mengenai bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalankan protokol kesehatan di Kota Semarang.

Salah satu pendekatan analisis yang dapat dilakukan untuk penilaian adalah dengan menggunakan SWOT. Pendekatan ini merupakan suatu cara yang sistematis untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang digunakan dalam merumuskan strategi suatu organisasi. Pendekatan SWOT ini berlandaskan pada faktor-

faktor yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), dengan cara mengurangi kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Adapun matriks SWOT disajikan dalam gambar berikut ini.

	<i>Strengths</i>	<i>Weakness</i>
<i>Threats</i>	<p>ST</p> <p>Memfaatkan potensi untuk menghadapi ancaman</p>	<p>WT</p> <p>Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman</p>
<i>Opportunities</i>	<p>SO</p> <p>Memfaatkan potensi untuk meraih peluang</p>	<p>WO</p> <p>Mengatasi kelemahan untuk meraih peluang</p>

Sumber: Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI, 2006

Gambar 1
Matriks SWOT

Berdasarkan gambar di atas dapat dihasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis yaitu:

1. Strategi ST adalah strategi menggunakan kekuatan Organisasi untuk mengatasi ancaman.
2. Strategi SO yang didasarkan pada pola pikir organisasi, yaitu merebut dan memanfaatkan peluang terbesar dan memanfaatkan semua keunggulan.
3. Strategi WO adalah strategi yang diterapkan dengan meminimalisir kelemahan dengan pemanfaatan peluang secara optimal.
4. Strategi WT yang didasarkan pada tujuan dalam menghindari ancaman

yang berpotensi berdampak pada organisasi dan meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada.

B. Kesadaran

Poedjawatna dalam Doratul Afifh (2014) berpendapat bahwa Pengetahuan, sadar, dan tahu merupakan unsur dari kesadaran, dalam pemaknaannya ketiga unsur tersebut dapat dipahami sebagai satu kesatuan yaitu kesadaran. Mengetahui atau sadar tentang keadaan yang sedang terjadi sehingga jiwa akan tergugah mengenai sesuatu. Kemudian Menurut pandangan Soekanto yang dikutip dalam Ambar Sih Wardhani (2008), disebutkan bahwa ada empat dimensi kesadaran yang saling berhubungan dan membentuk tahapan-tahapan dalam perjalanan kesadaran seseorang. Dimensi-dimensi tersebut terdiri atas pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan) dimana masing-masing mencerminkan tingkatan-tingkatan kesadaran yang bervariasi, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Aspek- aspek tersebut disempurnakan kembali oleh Benyamin Bloom yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani (2008) bahwa terdapat tiga domain yang membagi manusia dalam berperilaku secara sadar yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimaknai menjadi pengetahuan,

sikap, dan praktik (tindakan) yang tiap kriteria dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan sebuah refleksi atas pemaknaan yang awalnya telah diketahui dan telah dilakukan setelah seseorang melakukan aktivitas penginderaan melalui mata yaitu dengan melihat dan telinga yaitu mendengar terhadap suatu atau beberapa objek. Dengan demikian hal ini merupakan kriteria penting untuk pembentukan karakter seseorang.

2. Sikap

Sikap menurut Newcomb dalam kutipan Ambar Sih Wardhani (2010) bahwa sikap dapat dimaknai sebagai bentuk kesiapan diri dalam bertindak. Sikap merupakan suatu hal sebelum melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat berupa predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap memiliki beberapa tingkatan diantaranya menerima (*receiving*), merespon (*responding*), menghargai (*valuing*), dan bertanggungjawab (*responsible*).

3. Tindakan

Tindakan menurut Newcomb dalam kutipan Ambar Sih Wardhani (2010) terdiri dari empat tahapan yaitu persepsi (*perception*), respon terpimpin (*guided response*),

mekanisme (*mechanism*), dan adopsi (*adoption*). Tingkat kesadaran menurut Geller dalam Ambar Sih Wardhani terbagi menjadi *unconscious incompetence* yaitu tahap awal ketika seseorang tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan; *conscious incompetence* yaitu tahap kedua saat seseorang memahami apa yang harus dikerjakan namun diperlukan adanya pembelajaran; *conscious competence* yaitu tahap dimana seseorang dapat mengerjakan dengan benar karena mengikuti aturan yang telah ada; dan *unconscious competence*, tahap akhir dimana telah menjadi kebiasaan dan memahami secara benar apa yang harus dikerjakan oleh orang tersebut.

C. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Semarang

Pasal 1 ayat 6 dapat dimaknai bahwa Protokol Kesehatan merupakan suatu rangkaian yang wajib dilaksanakan oleh suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas. Adapun aktivitas yang diperlukan seperti memeriksa suhu tubuh, melakukan

pengadaan tempat cuci tangan, sabun dan penyaniitasi tangan (*handsanitizer*) serta penggunaan masker secara optimal. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa seluruh lapisan masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Adapun pelaksanaan protokol kesehatan yang tertuang pada pada peraturan ini dapat dimaknai seperti melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini dapat dilakukan melalui cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* setelah melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian penenaan masker di manapun berada, terutama saat keluar rumah. Selanjutnya membatasi diri agar tidak berdekatan dengan orang-orang atau pembatasan jarak secara fisik. Kemudian pembatasan aktivitas di luar rumah yang dapat berpotensi terhadap penularan Covid-19 seperti pemberhentian sementara kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung di sekolah atau institusi pendidikan lainnya, pembatasan kegiatan pekerjaan, keagamaan, kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya dan pergerakan menggunakan fasilitas transportasi publik. Adapun sanksi yang diberikan jika ditemukan adanya pelanggaran adalah teguran lisan, perintah berupa keharusan membeli masker, dan/atau perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penyajian data berupa pernyataan dan analisis. Penulis menggunakan operasional konsep dengan dimensi *Internal Factors Analysis Strategy* dan *External Factors Analysis Strategy* untuk variabel Strategi dengan menggunakan dimensi pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan) untuk variabel Kesadaran masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan kepada 13 informan yang terdiri dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Masyarakat dengan Pendidikan terakhir di bawah SMA/SMK sederajat, dan Masyarakat dengan pendidikan terakhir di atas SMA/SMK sederajat. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT untuk mengolah data, dengan membandingkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman, dengan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan. Pendekatan analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada evaluasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, dan hanya bertujuan sebagai dasar untuk menetapkan tujuan serta merumuskan strategi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Protokol Kesehatan di Kota Semarang

Pandangan yang dikemukakan oleh Soekanto dalam karya Ambar Sih Wardhani (2008) mengungkapkan bahwa ada empat dimensi kesadaran yang saling terkait dan membentuk rangkaian tahapan kesadaran. Dimensi-dimensi tersebut menandakan tingkatan-tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, yang mencakup elemen-elemen seperti pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan). Kemudian analisis mengenai faktor-faktor tersebut dikaji dalam paragraf berikut ini.

1. Pengetahuan

Merupakan representasi dari tahu dan telah terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan (mata dan telinga) terhadap suatu objek tertentu. Berdasarkan hasil wawancara perihal pengetahuan mengenai Perwal No. 28 Tahun 2020, dari 10 narasumber dengan perbedaan usia, latar belakang pendidikan, dan gender didapatkan hasil bahwa 50% narasumber tidak mengetahui adanya Perwal Kota Semarang nomor 28 Tahun

2020 dan 50% Narasumber mengetahui adanya Perwal Kota Semarang nomor 28 Tahun 2020. Empat dari lima narasumber yang mempunyai latar belakang diatas SMA mengetahui adanya Perwal Kota Semarang nomor 28 tahun 2020 atau sekitar 80%, dan pada kelompok narasumber yang mempunyai latar belakang di bawah SMA diperoleh data bahwa hanya satu dari lima narasumber yang mengetahui adanya Perwal Kota Semarang nomor 28 tahun 2020 atau sekitar 20%.

2. Sikap

menurut Newcomb dalam kutipan Ambar Sih Wardhani adalah kesiapan atau kesediaan dalam bertindak. Sikap merupakan suatu hal sebelum melakukan tindakan atau aktivitas, berupa predisposisi tindakan suatu perilaku. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Bapak Fajar Purwoto, SH.MM bahwa sikap masyarakat terhadap adanya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sangatberagam ada yang menerima dan merespon dengan baik, ada pula yang tidak merespon dengan baik, dan ada yang acuh tak acuh. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor yaitu latar belakang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan.

3. Tindakan

Tindakan merupakan suatu tingkah laku atau aksi yang diberikan oleh seorang individu sebagai bentuk respon yang ada dari dalam dirinya. Tindakan manusia menciptakan karakter dan sifat yang beragam sebagai hasil dari suatu proses interaksi dalam diri individu tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan oleh penulis ketika ikut dalam tim gabungan tiga pilar untuk melaksanakan operasi pembatasan kegiatan masyarakat adalah ketika melakukan operasi, sosialisasi, dan edukasi mengenai mematuhi protokol kesehatan tindakan yang diberikan oleh masyarakat sangat beragam, ada yang bertanya mengenai protokol kesehatan, ada yang langsung memakai maskernya, ada pula yang meninggalkan tempat sosialisasi dan operasi. Tindakan yang diberikan masyarakat berbeda-beda berdasarkan faktor ekonomi, Pendidikan, lingkungan, dan budaya.

2. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan COVID-19 di Kota Semarang

Terdapat 2 fokus utama dalam membentuk suatu strategi seperti yang diungkapkan oleh Rangkuti (2006), yaitu

pembentukan suatu strategi dapat disusun melalui 2 (dua) dimensi yaitu IFAS (Internal Factor Analysis Strategy) dan EFAS (Eksternal Factor Analysis Strategy). Adapun IFAS merupakan unsur pembentuk strategi yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan dari suatu organisasi, yang dapat dipahami sebagai bentuk kesimpulan dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Sedangkan EFAS merupakan unsur dimensi yang terdiri atas peluang dan ancaman dan dapat dimengerti sebagai berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi. Adapun perhitungan mengenai IFAS dan EFAS dijelaskan dalam paragraf berikut.

A. IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*)

Matriks faktor berikut menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Semarang dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Adapun Matriks berikut terdiri atas kriteria kekuatan yang dimiliki oleh Satpol PP yang didapat datanya dari teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang disimpulkan bahwa indikatornya adalah sebagai berikut.

1. Kekuatan

1.1. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator pertama yang mempengaruhi keberhasilan suatu strategi menurut Rangkuti (2013) adalah Struktur organisasi yang ada didalam organisasi tersebut. Struktur organisasi berperan penting dalam keberhasilan mencapai tujuan melalui suatu strategi yang akan diterapkan nantinya. Strategi yang efektif terjadi jika setiap individu sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan, sehingga setiap individu memahami dan menguasai tugas dan tanggungjawab dari masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, mengenai struktur organisasi dan pembagian tugas di satuan polisi pamong praja Kota Semarang terkait pencegahan penyebaran Covid-19 sudah dilaksanakan dengan baik karena pembagian tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih antara bagian satu dengan yang lainnya.

1.2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Visi dan misi organisasi memiliki peran sentral yang sangat penting bagi setiap organisasi. Visi berfungsi sebagai pandangan jauh ke depan yang menggambarkan tujuan besar yang ingin dicapai organisasi, sedangkan misi adalah

rencana tindakan konkret untuk mencapai visi tersebut. Tanpa visi yang jelas, organisasi akan mengalami ketidakjelasan arah, kehilangan fokus, dan akhirnya kehilangan motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Visi memberikan inspirasi dan tujuan yang bersama-sama memacu semangat dan energi bagi seluruh anggota organisasi. Sementara itu, misi berfungsi sebagai kompas yang membimbing langkah-langkah organisasi, menetapkan prioritas, dan merumuskan rencana tindakan yang terarah.

Visi dan misi yang kuat juga memainkan peran penting dalam menghubungkan organisasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Memiliki visi yang menginspirasi dan misi yang berdampak positif memungkinkan organisasi membangun kepercayaan dan reputasi yang positif di mata masyarakat, meningkatkan loyalitas anggota, serta menarik dukungan dan kolaborasi dari pihak eksternal. Hal ini sangat krusial untuk membangun jejaring yang solid dan berkelanjutan, serta menciptakan dampak sosial yang signifikan.

Selain itu, visi dan misi membantu organisasi untuk tetap relevan dan fleksibel menghadapi perubahan dan tantangan. Di tengah perubahan dunia yang cepat, organisasi dengan visi dan misi yang adaptif lebih mampu

beradaptasi, mengidentifikasi peluang baru, dan mengatasi hambatan yang muncul. Kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci dalam menjamin kelangsungan dan pertumbuhan organisasi di masa depan.

Tidak kalah pentingnya, visi dan misi yang kuat menjadi daya tarik bagi individu yang ingin bergabung dan berkontribusi dalam organisasi. Visi yang menginspirasi dan misi yang bermakna akan menarik individu yang memiliki nilai dan tujuan sejalan, sehingga menciptakan tim yang bersemangat, berkomitmen tinggi, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap kesuksesan organisasi.

Secara keseluruhan, visi dan misi organisasi merupakan landasan yang memberikan identitas, tujuan, dan arah bagi seluruh kegiatan organisasi. Kehadiran visi dan misi ini tidak hanya penting bagi pengendalian internal, tetapi juga menjadi daya tarik bagi pihak eksternal sehingga menghubungkan organisasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memahami dan memperkuat visi dan misi, organisasi memiliki potensi untuk menjadi kekuatan yang berpengaruh dalam menghasilkan perubahan positif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia sekitarnya.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang adalah mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota serta melakukan pembinaan satuan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan kota semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju masyarakat sejahtera. Sedangkan Misi satpol PP kota semarang untuk mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada intinya yaitu dengan meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan masyarakat dengan turut menegakkan peraturan yang ada di daerah atau berdampak pada daerah dan menciptakan perlindungan bagi masyarakat dalam mewujudkan suasana kota yang tertib, nyaman dan dinamis. Kemudian, peningkatan pengawasan operasional dengan pelaksanaan penindakan dan penataan terhadap pelanggaran yang ada dengan pengoptimalisasian para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tak hanya itu, pengembangan kompetensi aparatur juga turut dilakukan sebagai upaya menciptakan sumber daya yang berkualitas. Selanjutnya, upaya dalam menciptakan aparat penegak Perda yang independent, memiliki profesionalisme dan kredibilitas yang tinggi sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang akuntabel. Pemberian sanksi yang tegas juga merupakan salah satu bentuk

perwujudan terhadap pencapaian visi organisasi dan mengedepankan kolaborasi dengan berbagai mitra yang saling berhubungan sehingga dapat menciptakan kondisi yang saling mendukung satu sama lain dan dapat dengan mudah dalam pelaksanaan kordinasi.

Kemudian berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik karena dibuat melalui pembahasan dan koordinasi dengan pemerintah Kota Semarang. Selain itu menurut beliau, Visi dan Misi Satpol PP Kota Semarang telah disesuaikan juga dengan Visi dan Misi Walikota Semarang sehingga dapat saling menunjang dan melengkapi.

1.3. Tim Operasi 3 Pilar Yang Dibentuk Dalam Penegakkan Protokol Kesehatan

Pemerintah Kota Semarang Membentuk tim operasi 3 pilar patroli terpadu bekerja sama dengan Polres Kota Semarang dan Kodim Semarang, sehingga Kota Semarang menjadi kota pertama di Provinsi Jawa Tengah yang berhasil menurunkan level PPKM menjadi level 1. Menindaklanjuti hal tersebut, Satpol PP Kota Semarang Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan instruksi Mendagri, Perwal, dan Irwal untuk membentuk tim operasi 3 pilar patroli terpadu PPKM yang bertujuan memberi edukasi masyarakat

untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada.

2. Kelemahan

2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana operasional kerja adalah salah satu unsur untuk mencapai tujuan, upaya menjamin keberhasilan dan kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sarana dan Prasarana akan mempengaruhi banyak hal, baik dari kinerja pegawai pelaksanaan, keberlangsungan proses dalam menjalankan kegiatan, dan keberhasilan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Maka ketersediaan prasarana dan sarana kerja menjadi hal yang diperhatikan dan diutamakan.

Berdasarkan pengumpulan data, maka dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana yang ada masih dalam keadaan baik dan jumlahnya dinilai masih dapat menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang akan tetapi hal ini tidak sebanding dengan luas daerah Kota Semarang yang memiliki 16 kecamatan dengan 1,8 juta penduduk, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja terutama perihal meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai mematuhi protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Selain itu

masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang 81 perlu ditingkatkan kualitasnya supaya dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kinerja meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Semarang. Sarana prasarana yang di perbaharui akan berdampak signifikan dalam pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak peraturan daerah dan pelayan masyarakat.

2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Ketersediaan sumber daya yang sesuai akan mempermudah pelaksanaan kebijakan. Kegagalan dalam memilih strategi seringkali disebabkan oleh kurangnya

jumlah staf yang memadai dan kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf saja tidak cukup; diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diinginkan oleh atasan dan lembaga itu sendiri.

Indikator-indikator tersebut kemudian diberi bobot yang terdiri dari nilai 1 s.d. 4, dimana nilai 1 dapat diartikan sangat lemah dan nilai 4 yang berarti sangat kuat yang didasarkan pada keunggulan yang dimiliki oleh Satpol PP yang mencerminkan tingkat kepentingannya bagi organisasi sehingga dapat menjadi kekuatan bagi OPD dalam membuat strategi. Kemudian rating yang didasarkan pada olahan peneliti terkait dampak tiap kriteria dalam mendayagunakan kekuatan yang dimiliki dalam penentuan strategi. Hasil dari bobot dan rating kemudian dikali sehingga dapat diketahui nilai dari IFAS. Adapun hasil perhitungan berdasarkan data dimensi IFAS disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2
IFAS

Matriks Faktor Internal				
No	Kekuatan	Bobot	Rating	Nilai
1	2	4	3	5
1	Struktur Organisasi yang jelas	3	0,17	0,51
2	Visi dan Misi yang berkesinambungan dengan visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang	3	0,15	0,45
3	Adanya tim operasi 3 pilar yang dibentuk dalam penegakkan protokol kesehatan	4	0,20	0,80
Subtotal		10	0,52	1,76
No	Kelemahan	Bobot	Rating	Nilai
1	2		3	5
1	Sarana dan Prasarana yang kurang memenuhi	4	0,24	0,96
2	Kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang berkompentensi	4	0,24	0,96
Subtotal		8	0,48	1,92
Total		18	1,00	-0,16

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan hasil data yang terdapat pada tabel, maka dapat dipahami bahwa terdapat 4 jenis kekuatan dan 2 kelemahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Pemberian bobot tersebut disusun berdasarkan dampak krusial hingga tidak krusial. Data yang terdapat dalam tabel faktor internal

menunjukkan bahwa bobot kekuatan Satpol PP Semarang lebih tinggi dibandingkan dengan bobot kelemahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki kekuatan yang lebih besar. Kemudian, berdasarkan perhitungan maka

dapat diketahui bahwa nilai IFAS pada Satpol PP Kota Semarang adalah -0,16.

B. EFAS (*External Factors Analysis Strategy*)

Matriks faktor berikut menjelaskan tentang peluang dan ancaman yang dapat berimplikasi pada strategi Satpol PP Kota Semarang dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Adapun indikator EFAS didapat dari teknik pengumpulan data yang dijelaskan dalam paragraph berikut.

1. Peluang

1.1 Adanya Peraturan Walikota yang Menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Semarang

Adanya Peraturan Walikota Semarang dalam pedoman pelaksanaan kegiatan masyarakat pada situasi penyebaran Covid-19 sebagai salah satu yang berperan penting dalam penegakkan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Semarang. Karena pemerintah daerah sebagai pembuat dan pembentuk kebijakan, peraturan daerah, juga penyedia anggaran dan dana.

1.2 Dukungan Stakeholder Terhadap Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan Kota Semarang

Dalam usaha meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan sangat diperlukan dukungan stakeholders agar tujuan bersama dapat dicapai. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa para pemegang tongkat stakeholders di Kota Semarang juga sangat membantu dan memberikan kebebasan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengembangkan inovasi dan juga memberikan bantuan berupa dana, anggaran, dan fasilitas yang cukup dan memadai.

1.3 Perkembangan Teknologi dalam Mendukung Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan

Pemerintah Kota Semarang menaruh perhatian dan dukungan yang besar untuk terlaksananya e- government di lingkungan Pemerintah Kota Semarang termasuk dalam peningkatan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dapat dilihat dalam situs media sosial milik pemerintah kota semarang maupun akun pribadi walikota, dan wakil walikota yang aktif menghimbau dan menggalakkan gerakan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu pemerintah Kota Semarang juga memiliki website mengenai Covid-19 di

Kota Semarang, dimana di dalam *website* tersebut tersedia informasi mengenai jumlah angka positif Covid-19, angka sembuh sehat, maupun angka meninggal. Berdasarkan pengumpulan data, Penulis memahami bahwa Pemerintah Kota Semarang memberikan sumbangsih yang baik guna tercapainya pengembangan *e-governmen*. Dalam praktiknya Satuan Polisi Pamong Praja juga dapat menerima laporan online mengenai pelanggaran perda yang mengatur mengenai taat protokol Kesehatan sehingga dengan laporan online ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat dengan mudah menerima dan memeriksa lokasi yang dilaporkan warga banyak terjadi pelanggaran perda atau perkara terutama mengenai taat protokol Kesehatan.

1.4 Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi protokol kesehatan, aparat gabungan yang beranggotakan Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Kota Semarang, dan 88 Kodim Kota Semarang memiliki operasi gabungan bernama operasi 3 pilar pemberlakuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang setiap harinya bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di seluruh wilayah Kota Semarang terutama di tempat-tempat yang ramai pengunjung atau banyak orang berkerumun. Hal ini dilakukan agar

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap taat.

2. Ancaman

2.1 Situasi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian suatu daerah menentukan kelancaran suatu kegiatan, karena perekonomian juga dapat menjadi suatu hambatan terutama terkait dana atau anggaran.

Menurut penulis mengenai dana dan anggaran untuk kegiatan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan cukup memenuhi kebutuhan baik untuk intensif pegawai maupun sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan.

2.2 Pengaruh Sosial, Budaya, Demografis dan Lingkungan

Kondisi sosial, demografis, lingkungan, dan budaya yang ada saat ini dianggap sebagai elemen dinamis yang signifikan dalam bidang ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan. Menurut Ginandjar Kartasmita, seorang anggota dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres), dalam sesi panel kongres Internasional Ilmu Administrasi ke-28, budaya memiliki peran kunci dalam proses pengambilan kebijakan dan perkembangan suatu daerah atau negara. Dalam lingkungan multikultural, pejabat yang bertugas di organisasi publik berasal dari beragam daerah, sehingga pengambilan kebijakan harus disesuaikan dengan

karakter dan budaya penduduk setempat. Termasuk di Kota Semarang dengan 1,8 juta penduduk sangat memungkinkan bila banyak penduduk Kota Semarang yang bukan berasal asli dari Kota Semarang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, demografi, dan lingkungan di setiap daerah karena banyaknya etnis yang ada di lingkungan masyarakat Kota Semarang juga menentukan bagaimana sikap mereka saat menerima peraturan daerah yang ada.

Berdasarkan indikator yang telah

dianalisis tersebut kemudian diberikan angka pada bobot dan rating sama dengan perhitungan IFAS. Hal tersebut didasarkan pada tingkat kepentingan bagi organisasi dan dampaknya bagi organisasi yang dimulai dari skala 1 s.d. 4. Kemudian hasil dari bobot dan rating dikali sehingga dapat diketahui nilai dari EFAS yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi. Adapun hasil perhitungan berdasarkan data dimensi EFAS disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3
EFAS

Matriks Faktor Eksternal				
No	Peluang	Bobot	Rating	Nilai
1	2	3	4	5
1	Adanya Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Semarang	4	0,17	0,68
2	Dukungan Stakeholder Terhadap Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan Kota Semarang	4	0,15	0,60
3	Perkembangan Teknologi Dalam Mendukung Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan	4	0,15	0,60

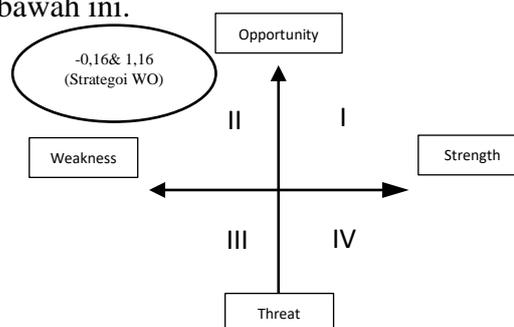
1	2	3	4	5
4	Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Protokol Kesehatan	3	0,20	0,60
Subtotal		15	0,67	2,48
No	Ancaman	Bobot	Rating	Nilai
1	Situasi Perekonomian Daerah	4	0,15	0,60
2	Pengaruh sosial, budaya, demografis, dan lingkungan	4	0,18	0,72
Subtotal		8	0,33	1,32
Total		23	1,00	1,16

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

Dari data yang telah disajikan, terdapat empat peluang dan dua ancaman yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Peluang dan ancaman tersebut diberi bobot berdasarkan tingkat pentingnya, dari sangat penting hingga tidak penting. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa peluang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ancaman, menandakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Dengan mengalikan bobot dengan rating, diperoleh skor untuk faktor eksternal (peluang dan ancaman) dari organisasi tersebut. Total skor untuk peluang dan ancaman adalah 1,16.

Rumusan Strategi

Setelah dilakukan perhitungan EFIS dan EFAS maka diketahui bahwa jumlah masing-masingnya adalah -0,16 dan 1,16. Selanjutnya dirumuskan strategi berdasarkan kuadran yang gambarkan di bawah ini.



Sumber: Diolah peneliti, 2023

Gambar 3
Kuadran SWOT

Adapun berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat diketahui bahwa posisi organisasi terletak pada Kuadran II. Guna mendukung upaya meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, maka dirumuskan strategi sesuai indikator yang telah dihitung. Jenis strategi tersebut adalah “WO” yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Berdasarkan penentuan jenis strategi yang dimaksud, maka dirumuskan beberapa strategi diantaranya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penegakkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Semarang.
2. Diperlukan upaya perubahan yang dimaksud seperti meningkatkan kolaborasi terhadap *stakeholder* yang ada dengan prinsip pentahelix (Pemerintah, Swasta, Media, Akademisi dan Masyarakat);
3. Optimalisasi pemanfaatan sosial media dalam mendukung program peningkatan kesadaran masyarakat mematuhi protokol Kesehatan yang diadakan oleh Satpol PP Kota Semarang; dan
4. Pengembangan kompetensi SDM Aparatur Satpol PP dengan pemanfaatan teknologi yang ada.

PENUTUP

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di Kota Semarang adalah: a) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penerapan protokol Kesehatan; b) Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui adanya perda dan perkara mengenai protokol Kesehatan; c) Faktor lingkungan yang tidak menerapkan protokol kesehatan; d) Faktor ekonomi dimana banyak masyarakat yang merasa membeli masker dan handsanitizer dirasa cukup mahal; e) Banyaknya hoax yang tersebar di kalangan masyarakat mengenai covid-19.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja menurut analisis SWOT memiliki IFAS - 0,16 dan nilai EFAS 1,16. Dengan begitu maka pendekatan strategi yang digunakan adalah “WO” yaitu memanfaatkan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan upaya perubahan yang dimaksud seperti optimalisasi penegakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Semarang, meningkatkan kolaborasi terhadap

stakeholder yang ada dengan prinsip pentahelix (Pemerintah, Swasta, Media, Akademisi dan Masyarakat), optimalisasi pemanfaatan sosial media dalam mendukung program peningkatan kesadaran masyarakat mematuhi protokol Kesehatan yang diadakan oleh Satpol PP Kota Semarang dan upaya pengembangan kompetensi SDM Aparatur Satpol PP berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Wardhani Sih, “Studi Tentang Kesadaran Pekerja Terhadap Pelaporan Kecelakaan Kerja Di Pt Astra Nissan Diesel Indonesia Periode Juni - Juli Tahun 2008” (Universitas Indonesia, 2008).
- Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during professional rugby league skills training. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 13(6), 578-583. doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007
- Karlan, D. S., & Zinman, J. (2012). List randomization for sensitive behavior: An application for measuring use of loan proceeds. *Journal of Development Economics*, 98(1), 71-75.
- Mann, D. L. (2010). *Vision and expertise for interceptive actions in sport* (Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, Australia). Retrieved from <http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704>
- Ministry of Health. (2014). *Ebola: Information for the public*. Retrieved from <http://www.health.govt.nz/your-health/conditions-and-treatments/diseases-and-illnesses/ebola-information-public>
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kota Semarang

Rangkuti, Freddy. (2013). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, Dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

W. Lawrence Neuman Social. (2000) *Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon: London.